



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MASALAH KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Pertama
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kekurangan dokter spesialis beserta pemerataan distribusinya masih menjadi masalah yang belum dapat diatasi. Rasio kebutuhan dokter terutama dokter spesialis masih jauh dari kondisi ideal. Rasio dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 0,006 per 1.000 penduduk. Rasio tersebut masih jauh dari rasio keseluruhan dokter spesialis yang sebesar 0,15 per 1.000 penduduk. Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia, per November 2022 jumlah dokter spesialis sekitar 48.784 orang sedangkan dokter spesialis yang memiliki surat tanda registrasi sebesar 44.753 orang.

Selain rasio yang sangat kecil, distribusi dokter spesialis masih belum merata. Banyak daerah terpencil yang tidak mempunyai dokter spesialis. Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia, terdapat 42% kabupaten/kota yang belum memiliki dokter spesialis utama seperti spesialis penyakit dalam, kandungan, bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis. Kementerian Kesehatan telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di setiap rumah sakit umum daerah melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya dengan memprioritaskan rekrutmen dokter spesialis untuk menangani penyakit yang menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia seperti spesialis onkologi untuk penyakit kanker, spesialis jantung dan pembuluh darah untuk penyakit jantung, spesialis neurologi untuk penyakit strok, serta spesialis nefrologi untuk penyakit ginjal.

Selain itu, untuk mengatasi krisis jumlah dokter spesialis, Kementerian Kesehatan dapat mengubah proses Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan metode *hybrid* yaitu menggabungkan pola *university based* dengan *hospital based*. Selama ini, peserta PPDS tidak mendapatkan gaji karena dianggap sedang belajar. Pola *university based* yang sudah berjalan selama ini dapat digabungkan dengan metode *hospital based* bagi rumah sakit yang mampu serta memenuhi persyaratan pendidikan spesialis. Dengan adanya pola *hybrid* tersebut, peserta PPDS dapat menjadi pegawai rumah sakit dan mendapatkan gaji. Hal ini juga dapat menjadi solusi terkait ketimpangan penyebaran dokter spesialis di berbagai daerah. Dengan adanya pola tersebut, maka *academic health system* harus berjalan. Sistem tersebut merupakan model kolaborasi antara universitas, dinas kesehatan, rumah sakit, serta institusi terkait yang masuk dalam rangkaian visi berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat sinergi antara sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, mahalnya biaya pendidikan kedokteran spesialis menjadi salah satu penyebab kurangnya dokter spesialis. Untuk mengatasinya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis. Di mana lulusannya dapat disebar merata di seluruh daerah dan tidak terpusat di kota besar.

Atensi DPR

Tiga masalah klasik pelayanan kesehatan di Indonesia adalah terkait kuantitas, kualitas, dan distribusi baik tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Upaya pemenuhan jumlah dokter spesialis dan fasilitas penunjang dilakukan dalam rangka transformasi sistem kesehatan Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya kerja sama multisektor. Komisi IX DPR RI perlu memastikan rencana aksi pemerintah untuk mempercepat mengatasi permasalahan kebutuhan dokter spesialis. Selain itu, melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu memasukan materi muatan terkait dokter spesialis terutama terkait pola pendidikan serta pendayagunaannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Sedangkan, melalui fungsi anggaran DPR RI, dapat menambahkan anggaran untuk PPDS serta dukungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Sumber

Media Indonesia, 12 & 13 Desember 2022;
Republika, 12 & 13 Desember 2022;
Raker Kemenkes, 22 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022